

TESIS

TELAAH POLITIK HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM



SAMSUL ARIF

No. Mhs : 225214909



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2024**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MEGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Samsul Arif
Nomor Mahasiswa : 225214909
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Nama Pembimbing	Tanggal	TTD
1. Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H, M.Hum	28 Juni 2024	
2. Dr. Hyronimus Rihti, S.H., LL.M.	04 Juli 2024	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MEGISTER HUKUM

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Arif

No. Mahasiswa : 225214909

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

“Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Juli 2024

Yang menyatakan



Samsul Arif


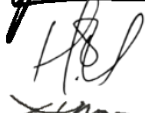
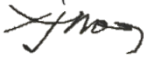


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MEGISTER HUKUM


PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Samsul Arif
Nomor Mahasiswa : 225214909
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 10 Juli 2024

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rihti, S.H., LL.M.	
3. Anggota	Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi


Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Allah Tidak Akan Membebani Sesorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”

(QS: Al-Baqarah Ayat 286)

“Presumptio Lex, Priusquam Feriat”

“Semua orang dianggap tahu hukum”

“Mulailah Bermimpi Dan Perjuangkan Mimpimu

Impianmu Adalah Sejarah Kehidupanmu

Keputusan Langkahmu Adalah Keputusan Masa Depanmu”

-Qais Arifien-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bersyukur atas segala nikmat dan anugerah iman yang diberikan oleh Allah SWT menjadi permata dalam hidup. Segala puji baginya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan semangat bagi penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi yang disetiap tetes syafaatnya dirindukan oleh setiap insan beriman, beliau seorang panglima perang tanpa pamrih, seorang pemimpin tanpa gaji, seorang pahlawan tanpa sertifikasi, seorang insan yang patut di teladani, beliaulah kekasih ilahi robbi. Tidak ada hasil tanpa perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa kemauan dan tidak ada kemauan tanpa ada i'tikad dalam hati yang kuat, usaha yang kuat akan menghasilkan hasil yang baik. Namun, hal itu tidak akan sempurna tanpa do'a, perjuangan dan dukungan dari orang-orang di sekelilingku. Maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam bentuk tesis yang berjudul "Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"

Penulisan tesis ditempuh dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hukum jenjang strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun dapat terselesaikan dengan baik dikarenakan dukungan dari berbagai pihak.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tidak ada terbatas kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum dan Dr. Hyronimus Rhiti, S. H., LL. M., selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh staf akademik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

6. Narasumber yang memberikan informasi kepada penulis Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H. M.Hum.;
7. Kedua orang tua penulis Rama Marwito serta ibunda tercinta Syamsiyah yang telah memberikan motivasi disetiap anaknya mengalami ujian dan rintangan serta selalu mendoa'akan dengan tulus dan ikhlas
8. Kakak Penulis Suhairi yang telah rela memberikan sebuah amanah kepada penulis dan mengalah untuk bekerja dari pada kuliah dan memprioritaskan adiknya untuk melanjutkan diperguruan tinggi semuga imu yang didapatkan bermanfaat;
9. Seluruh rekan pergerakan kawan-kawan KAMASSTA penulis; serta
10. Seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis terimakasih yang tidak batas.

Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin, serta menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT.
Jazakumullahu khairon.

Yogyakarta, 5 Juli 2024

Peneliti,



Samsul Arif

DAFTAR ISI

TESIS	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PERYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Politik Hukum.....	23
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	24
C. Pemilihan Umum	33
D. Sistem Demokrasi	35
E. Landasan Teori.....	36
F. Batasan Konsep.....	45
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Data Penelitian	53
D. Cara Pengumpulan Data Penelitian	57
E. Analisis Data.....	58
F. Proses Berpikir.....	59

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam menambah frasa dalam pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 61

1. Gagasan *Judicial Review* 63
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian Of Constitutional*) 69
3. Kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi 82
4. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi 89

B. Analisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap arah demokrasi serta pemilihan umum yang bermartabat 105

1. Runtuhnya supremasi hukum dan kemunduran demokrasi 107
2. Lembaga independent yang tak lagi mengawal pemilu yang bermartabat 115

BAB V

PENUTUP..... 126

A. KESIMPULAN 126

B. SARAN..... 127

DAFTAR PUSTAKA..... 128

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan karpet merah terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masih belum berusia empat puluh (40) tahun tetapi diperbolehkan berpartisipasi untuk pemilu tahun 2024 walaupun secara usia tidak mencukupi, namun boleh mencalonkan asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan terkait dengan uji materil tersebut menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, karna dari sebagian hakim yang memutuskan tidak semuanya mengabulkan permohonan pemohon adanya sebuah *concurring opinion* dan *dissenting opinion* telah meberikan gambaran bagaimana putusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kontekstual, dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana substansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan dalam melakukan pengujian norma pasal yang bersifat *open legal policy* dengan memperbandingkan terhadap putusan sebelumnya dengan perkara yang sama pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari analisis penelitian ini, sejatinya kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya diperbolehkan sebagai *negative legislator* yang hanya bisa membatalkan norma dalam suatu undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal atau bagian yang ada dalam suatu undang-undang bertentangan dengan norma dalam konstitusi, secara normatif Mahkamah Konstitusi tidak boleh memberikan putusan *positive legislator* yang kewenangannya dimiliki oleh DPR bersama Pemerintah, dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah berperan sebagai *positive legislator* yang dalam amar putusannya memberikan alternatif terhadap batas usia Capres dan Cawapres, sehingga secara konsep *trias politica* keseimbangan serta seajarnya diantara lembaga negara untuk menjaga supremasi konstitusi sudah runtuh.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, legitimasi, pemilihan umum.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has provided a red carpet for Presidential and Vice Presidential Candidates who are not yet forty (40) years old but are allowed to participate in the 2024 elections even though they are not of sufficient age, but may nominate as long as they have been or are currently serving as regional heads elected through general elections. The decision related to the judicial review caused uproar in the community, because some of the judges who decided did not all grant the applicant's request, the existence of a concurring opinion and dissenting opinion has illustrated how the decision is not in accordance with the procedures of justice and legal certainty. This research method uses normative research using a statutory approach, contextual approach, and case approach. The purpose of this research is to find out the extent to which the substance of the Constitutional Court's decision on the authority to review the norms of articles that are open legal policy by comparing to previous decisions with the same case in Article 169 letter q of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections. The results of the analysis of this study, in fact the authority of the Constitutional Court is only allowed as a negative legislator who can only cancel norms in a law if the content, material, formulation of articles or parts in a law is contrary to the norms in the constitution, normatively the Constitutional Court may not give a positive legislator decision whose authority is owned by the DPR together with the Government, in the case a qou the Constitutional Court has acted as a positive legislator who in his ruling provides an alternative to the age limit of the presidential and vice presidential candidates, so that in the concept of trias politika the balance and parity between state institutions to maintain the supremacy of the constitution has collapsed.

Keywords: *Constitutional Court decisions, legitimacy, general elections*

